



**PERATURAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN GRESIK
Nomor : 168 Tahun 2023

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah antara lain Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah; Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah; Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam

perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Proses penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2024 sebagai hasil dari sinkronisasi keterpaduan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dalam pembahasan perencanaan di Forum OPD antara usulan rencana Top Down dengan usulan rencana usulan Bottom Up hasil Musrenbang kecamatan Tahun 2023.

Selanjutnya Renja PD yang telah disusun akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas yang kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam rangka penyusunan Rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik adalah :

- a. Undang- undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- b. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- e. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
- l. Peraturan Bupati Gresik Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- m. Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Gresik disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- c. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB. I. PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD dan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun n-2 dan tahun n-3) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaannya dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, pada tahun 2022 semula menyusun sebuah Rencana Kerja Dinas (Renja) yang berisikan usulan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023. Usulan program dan kegiatan tersebut terbagi atas non urusan (1 program dengan 5 kegiatan dan 14 Sub kegiatan) dan urusan Kelautan dan Perikanan (4 program dengan 8 kegiatan dan 13 Sub kegiatan).

Proses selanjutnya, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang kemudian diverifikasi dan disahkan untuk dijadikan sebuah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Jumlah program dan kegiatan yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dibandingkan dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Renja SKPD	DPA SKPD
1	Non Urusan	1 program; 5 kegiatan; 15 Sub kegiatan	1 program; 5 kegiatan; 14 Sub kegiatan
2	Urusan Kelautan dan Perikanan	4 program; 11 kegiatan; 21 Sub kegiatan	4 program; 8 kegiatan; 13 Sub kegiatan

Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2023 mengalokasikan 2 (dua) kegiatan DAK dengan sumber anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Anggaran tersebut ditransfer ke Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan progress fisik yang dicapai. Mekanisme penganggaran kegiatan DAK Tahun 2023 seperti Tahun 2022, yakni tanpa ada pendampingan anggaran dari APBD Pemerintah

Kabupaten Gresik, mulai dari pekerjaan yang bersifat non fisik (administrasi proyek) maupun fisik.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perikanan Kabupaten Gresik mulai Tahun 2020 tidak lagi mempunyai kewenangan mengeluarkan segala bentuk surat perijinan. Semua tersentral satu atap pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Pemerintah Kabupaten Gresik, termasuk Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Budidaya Ikan (SIB).

Disisi lain, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan kesehatan ikan melalui Unit Pelaksana Teknis Laboratorium kesehatan Ikan dan Lingkungan. Tahun 2022, sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) uji sampel telah dilakukan yang meliputi uji kualitas air sebanyak 65 sampel, uji kualitas tanah sebanyak 25 sampel, uji mikrobiologi sebanyak 20 sampel dan uji PCR sebanyak 15 sampel. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel 2.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik maka tugas pokok yang diemban Dinas Perikanan Kabupaten Gresik adalah :

“ Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perikanan “

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan program urusan perikanan
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan perikanan
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi urusan perikanan
- d. Pelaksanaan pengendalian kebijakan urusan perikanan
- e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan perikanan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan perikanan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Isu dan Permasalahan

Dalam rangka pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan dan peternakan disamping mempunyai peluang yang menjanjikan juga dihadapkan pada berbagai macam permasalahan sekaligus tantangan yang harus dihadapi. Permasalahan tersebut diantaranya:

1. Harga pakan yang berkualitas cenderung naik
2. Upaya peralihan penggunaan obat-obatan yang disarankan sesuai CBIB
3. Terbatasnya benih yang berkualitas
4. Kurangnya penyediaan induk berkualitas
5. Kurangnya teknologi budidaya/perbenihan untuk komoditas yang sedang dan akan dikembangkan
6. Alat tangkap nelayan yang masih tradisional dengan kemampuan one day fishing
7. Peningkatan kualitas garam untuk garam industri

8. Sumberdaya Manusia pengolah hasil perikanan masih rendah, berskala kecil, tradisional
9. Masih kurangnya pengetahuan nelayan
10. Peningkatan dan pembinaan kelompok masyarakat pengawasan
11. Sumberdaya Manusia pengolah hasil kelautan beberapa masih rendah, berskala kecil, tradisional
12. Menurunnya mutu lahan budidaya akibat cara budidaya yang tidak baik dan benar dan penggunaan obat-obatan terlarang
13. Pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan untuk penanganan konflik wilayah, baik antar wilayah maupun pengguna jasa kelautan/pesisir
14. Pengolahan hasil produksi perikanan masih tradisional
15. Masih rendahnya kesadaran pengolah/perusahaan pengolah produk perikanan akan mutu produk
16. Jaminan mutu produk perikanan olahan dengan daya beli masyarakat belum sesuai
17. Pemasaran produk perikanan kurang efisien
18. Penanganan hasil tangkapan ikan di atas kapal masih tradisional
19. Pengolahan hasil penangkapan masih banyak tradisional
20. Masih rendahnya kesadaran pengolah/perusahaan pengolah hasil penangkapan akan mutu produk
21. Kurangnya penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain System dan Catch Sertificate (Sertifikasi Hasil Tangkap)
22. Jaminan mutu produk olahan penangkapan dengan daya beli masyarakat belum sesuai

23. Pemasaran produk kelautan kurang efisien
24. Permodalan
25. Sarana dan prasarana pelabuhan belum memadai
26. Kemampuan SDM
27. Persyaratan Ekspor
28. Keterbatasan bahan baku
29. Kurangnya respon terhadap komitmen dan Program Minapolitan
30. Rusaknya ekosistem mangrove di beberapa tempat di Kab. Gresik akibat penebangan liar
31. Penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti minitrawl
32. Akibat perubahan cuaca ekstrim banyak nelayan tidak melaut sehingga mempengaruhi pendapatan nelayan
33. Sebagai tindak lanjut RT/RW (revisi) dan penzonasian KP3K dilanjutkan dengan penyusunan Renstra dan zonasi rinci KP3K Kab. Gresik
34. Identifikasi biodiversivitas wilayah pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD disusun dengan menggunakan rancangan Renja-OPD dengan Kepala OPD. Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD. Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah. Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar-OPD dan antar-Rencana Pembangunan Kecamatan. Musrenbang RKPD kabupaten/kota dimulai dari Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan, Forum OPD / Gabungan OPD, serta Musrenbang Kabupaten. Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD.

Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik memiliki persamaan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Gresik, dalam hal program dan kegiatan serta pagu indikatif yang diusulkan. Kesamaan tersebut telah melalui proses analisis berdasarkan kebutuhan di Dinas Perikanan kabupaten Gresik. Sehingga apabila ada dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam hal penyediaan dana indikatif maka usulan program kegiatan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dapat terlaksana dengan baik. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel 3.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Forum OPD merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Kegiatan Musrenbang Kecamatan dengan OPD terkait, serta menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh OPD terkait.

Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*) yang diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, serta nasional.

Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah Forum OPD. Forum ini cukup strategis karena mempertemukan kelompok masyarakat sektoral dan spasial.

Dalam forum ini dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil Musrenbang Kecamatan dengan Draf Rencana Kerja OPD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sektor.

Dinas Perikanan Kabupaten Gresik telah melaksanakan acara forum OPD untuk menghimpun dan mensinergikan usulan-usulan kegiatan, baik yang berasal dari Bottom up maupun Top down. Setelah dilakukan analisis kesesuaian usulan terhadap isu-isu

penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Gresik semuanya memiliki kesamaan, sehingga dimungkinkan dapat dilaksanakan sepenuhnya apabila mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Proses selanjutnya, usulan-usulan tersebut kemudian di skala prioritas berdasarkan tingkat ketergesaan pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan masyarakat. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2023 di bidang perikanan dan kelautan dapat dilihat pada tabel 4.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan kelautan dan perikanan, sebagaimana ditegaskan dalam RPJMN Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019-2024 memiliki 7 (tujuh) arah kebijakan dengan 18 (delapan belas) strategi pencapaian, antara lain yang tersebut pada tabel di bawah ini:

<i>Arah Kebijakan</i>	<i>Strategi</i>
1. Peningkatan produksi ikan	a. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor b. Pengelolaan usaha perikanan secara berkelanjutan
2. Peningkatan konsumsi ikan	a. Kampanye gemar makan ikan b. Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran dalam rangka meningkatkan mutu dan keamanan pangan
3. Peningkatan daya saing dan nilai tambah	a. Peningkatan mutu produk perikanan b. Pengembangan sistem logistik nasional c. Peningkatan utility UPI dan kepastian pasokan bahan baku

	d. Pengendalian impor
4. Tata kelola	a. Pengaturan tata ruang laut b. Penyelesaian rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil c. Indonesian ocean policy
5. Pengurangan dampak bencana pesisir dan pencemaran laut	a. Peningkatan ketahanan masyarakat pesisir terhadap bencana laut dan penanganan pencemaran laut b. Penanaman mangrove di kawasan pesisir yang rusak
6. SDM dan IPTEK yang mendukung	a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pengetahuan, terutama terkait dengan peningkatan wawasan bahari dan peningkatan kapasitas masyarakat dengan berorientasi pada permintaan b. Meningkatkan kemampuan iptek terkait dengan pengelolaan SDK
7. Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan/masyarakat pesisir	a. Peningkatan program kehidupan nelayan berbasis usaha perikanan b. Program perlindungan nelayan dan pembudidayaan ikan, termasuk asuransi, sertifikasi dan sebagainya c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

Sejalan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pertambahan jumlah penduduk, pendapatan masyarakat dan keterbatasan sumberdaya alam yang tersedia maka mendorong pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di laksanakan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain tuntutan untuk melestarikan sumberdaya kelautan, dan perikanan juga semakin besar sejalan dengan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungannya.

Arah Kebijakan

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan umum merupakan telaah strategi pembangunan yang telah ditentukan untuk menghasilkan program yang paling efektif mencapai sasaran. Rumusan kebijakan umum menjadi wahana untuk mengkompilasikan program-program prioritas yang inherent dalam mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan arah kebijakan yang ditentukan.

Dalam perencanaan jangka menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Kebijakan umum diletakkan sebagai wahana yang komprehensif untuk mengkompilasi program-program pembangunan daerah berdasarkan strategi yang ditetapkan guna mencapai sasaran.

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah 9 Prioritas Tematik yang diperkenalkan dengan istilah “**Nawa Karsa**” yang menjadi nafas pembangunan menuju Gresik Baru yaitu :

1. Gresik Akas (Amanah, Kolaboratif, Antisipatif dan Sigap)
2. Gresik Seger (Sejahtera, Bahagia dan Berdikari)
3. Gresik Mapan (Maju, Pintar dan Aman)
4. Gresik Agropolitan
5. Gresik Mandiri (Gema Berkarya)

6. Gresik Cerdas
7. Gresik Sehati
8. Gresik Barokah, dan
9. Gresik Lestari

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Perikanan dan Rancangan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 -2026 dengan beberapa program prioritas diantaranya:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya ;
- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan

Mengacu pada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2023–2026 dan sesuai visi misi, maka tujuan pembangunan perikanan yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha kelautan dan perikanan
2. Pemanfaatan sumber daya kelautan, perikanan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan
3. Tercapainya kecukupan Gizi dari Protein Hewani masyarakat dari hasil Perikanan

3.2.2 Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi yang akan diemban oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gresik maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha kelautan dan perikanan

2. Terwujudnya Pemanfaatan sumber daya kelautan, perikanan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan
3. Tercapainya kecukupan Gizi dari Protein Hewani masyarakat dari hasil Perikanan

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2024, Program dan Kegiatan tahun 2024 disusun berdasarkan :

1. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Gresik;
2. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional;
3. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik

Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 direncanakan 5 (lima) Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 (lima belas) kegiatan dan Sub kegiatan sebanyak 36 (tiga puluh enam) yang terdiri atas 15 (lima belas) Sub kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 8 (delapan) Subkegiatan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, 6 (enam) Sub kegiatan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, 6 (enam) Sub kegiatan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan 3 (tiga) Sub kegiatan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 16.086.473.518,- (enam belas juta delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

I. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Rp. 2.130.000.000,00
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Rp. Rp. 580.000.000,00

- c. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Rp. 1.150.000.000,00
- d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Rp. 3.235.000.000,00

Program Non Urusan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 7.701.081.518,00

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, terhadap Program dan kegiatan, ada perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, hal ini didasarkan pada analisa kebutuhan operasional serta sinkronisasi sasaran program dan kegiatan yang diusulkan.serta Anggaran yang tersedia .

Rencana Kerja (Program/Kegiatan) Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2024, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

BAB IV

P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang - undang Nomor 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renja Dinas Perikanan Tahun 2023 selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2024
Dengan ditetapkannya Renja Dinas Perikanan Tahun 2024 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang kelautan dan Perikanan terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahun 2024;
2. Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Tahun 2024;
3. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini akan dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam renja ini.

Gresik, 3 Pebruari 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN GRESIK



MOH. NADLELAH SP.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660815 198702 1 005

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik
Tahun 2024**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.00 DINAS PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.00 DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencan a Tahun 2024					Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Progra m	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiata n	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolo k Ukur	Targe t	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							8.385.392.000				19,985,226,395		
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							2.130.000.000				1,790,690,300		
3	25	02	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota							1.330.000.000				293,250,000		
3	25	02	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Terse		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3	25	02	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 paket		1.180.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3	25	02	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota							500.000.000				781,450,300		
3	25	02	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		330 Orang		250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0

3	2	0	2.0	0	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Kelompok		150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3	2	0	2.0	0	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan , Kemitraan Usaha		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Unit Usaha		100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3	25	02	2.0	3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								300.000.000					618,240,000
3	2	0	2.0	0	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraa n Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4Layanan 50Dokumen		300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catata n Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiata n				Tolo Ukur	Target	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							1.970.400.000				5,631,143,935		
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil							670.400.000				2,804,673,935		
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Kelompok		620.400.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3	25	03	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Kelompok		50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3	25	03	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan							1.300.000.000				2,826,470,000		
3	25	03	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Unit		1.150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0

3	25	03	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0
3	25	03	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Orang 4 Kelompok	50.000.000,	PENDAPATA N ASLI DAERAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0
3	25	03	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	50.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0
3	25	03	2.04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	50.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
3	25	04			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.049.992.000,00		1.150.000.000
3	25	04	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						1.150.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Targ et
3	25	04	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		1.049.992.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0
3	25	04	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		549.997.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0

3	25	05			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							717.800.300					1,679,460,000	
3	25	05	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							2.100.000.000					287,500,000	
3	25	05	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 unit usaha		2.100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3	25	05	2.03		Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota							1.135.000.000					1,184,500,000	
3	25	05	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200000 Ton		350.000.000,	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3	25	05	2.03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Pelaku Usaha		785.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0

3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						8,364,045,300					9,066,472,160
3	25	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.000.000					86,480,000
3	25	01	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung	6 Dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3	25	01	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8 laporan	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan						5.575.106.443					6.132.617.087
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung	12 Bulan	5.575.106.443	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				6.132.617.087

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	2.08		Administrasi Umum								627.069.650				1,786,707,850	
3	2	0	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung		9 Paket		35.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3	2	0	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36 Paket		329.528.350	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3	2	0	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 Paket		25.137.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3	2	0	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung		12 Paket		75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3	2	0	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung		12 Bulan		26.670.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3	2	0	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-		Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung		3 Dokumen		5.988.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0

